

Perspektif Pengentasan Kemiskinan dengan Pendekatan Agribisnis

Pantjar Simatupang dan Effendi Pasandaran

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian

ABSTRAK

Dewasa ini masih terdapat sekitar 27 juta penduduk miskin yang sebagian besar berdomisili di pedesaan. Di pedesaan, mereka menggantungkan hidup pada usaha pertanian. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis merupakan upaya yang memungkinkan untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan. Secara teoritis, ada lima teori dasar yang dapat menjelaskan timbulnya kemiskinan yaitu teori klasik (naturalis), teori ekonomi radikal, teori ekonomi neoklasik, teori marginalisasi sosial, dan teori fungsional. Dari kelima teori ini, teori ekonomi neoklasik dianggap relevan sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis. Pada dasarnya, agribisnis sangat cocok untuk mendorong pertumbuhan dan efisiensi usaha, tetapi tidak difokuskan pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis tepat sekali untuk menimbulkan dampak immiserizing bagi petani, khususnya petani tanaman pangan miskin, tetapi dapat menimbulkan tekanan (stress) terhadap usahatani tanaman pangan yang berskala kecil.

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan pada PJP I telah berhasil menurunkan jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan secara tajam (Booth 1992). Sebagai gambaran, dari hasil penelitian BPS diketahui bahwa penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 54,2 juta orang (40% dari total penduduk) pada tahun 1976 menjadi 27,2 juta orang (15% dari total penduduk) pada tahun 1990. Keberhasilan dalam memerangi kemiskinan ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa dan telah mendapat pengakuan dari kalangan internasional seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia (World Bank 1990). Pada PJP II, khususnya pada Pelita VI, upaya penanggulangan kemiskinan mendapat prioritas utama.

Dari 27,2 juta orang penduduk miskin pada tahun 1990, sebanyak 17,8 juta orang (65%) di antaranya tinggal di pedesaan yang sumber pendapatannya sebagian besar tergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, logis kalau pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan, mendapat prioritas untuk penanggulangan kemiskinan.

Dalam kaitan itu, akhir-akhir ini berkembang pemikiran bahwa pendekatan agribisnis merupakan strategi yang tepat untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan secara umum dan khususnya di sektor pertanian. Namun, pendekatan agribisnis merupakan strategi umum bagi pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan, jadi bukan strategi khusus untuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan agribisnis untuk pengentasan kemiskinan hendaklah dilakukan dengan penuh hati-hati.

KERANGKA TEORI PENYEBAB KEMISKINAN

Upaya pengentasan kemiskinan senantiasa didasarkan pada suatu kerangka pemikiran tentang penyebab dan proses terjadinya kemiskinan tersebut. Ada lima teori dasar yang menjelaskan timbulnya kemiskinan yaitu :

1. Teori klasik (naturalis)
2. Teori ekonomi radikal
3. Teori ekonomi neoklasik
4. Teori marginalisasi sosial
5. Teori fungsional

Teori Klasik

Teori ini dicetuskan oleh Malthus pada awal abad ke-19. Menurut teori klasik, kemiskinan terjadi karena adanya keterbatasan alam untuk menghasilkan barang-barang, khususnya pangan, yang dibutuhkan manusia. Sumber daya alam mempunyai batas daya dukung tertentu. Apabila jumlah penduduk bertambah hingga melewati ambang daya dukung alam maka akan terjadi kemiskinan massal.

Satu-satunya upaya yang mungkin untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah menyeimbangkan jumlah penduduk dengan produksi. Jumlah penduduk harus diatur sehingga sesuai dengan daya dukung sumber daya yang ada. Untuk itu, laju pertumbuhan penduduk harus dikendalikan dan jumlah produksi harus terus dipacu.

Teori klasik tergolong aliran pemikiran pesimistik. Ramalan teori ini terbukti salah. Teori ini tidak memperhatikan kemampuan manusia untuk menciptakan ilmu dan teknologi yang dapat melipatgandakan daya dukung alam dan mengatur pertumbuhan penduduk. Di samping itu, teori klasik juga tidak menjelaskan mekanisme distribusi produksi (pendapatan), sehingga tidak dapat dipakai untuk menjelaskan faktor kemiskinan relatif yang menjadi fenomena umum dunia.

Teori Ekonomi Radikal

Teori ekonomi radikal mengatakan bahwa masalah kemiskinan merupakan dampak yang tidak terelakkan dalam sistem perekonomian kapitalis (pasar bebas). Pada sistem ini, kaum buruh merupakan kelas yang sangat lemah dan akan menjadi mangsa kelas kapitalis yang menguasai alat-alat produksi. Posisi kaum buruh semakin tertekan dan

terpatriti mati pada sistem perekonomian kapitalis karena pemerintah cenderung bersekongkol dengan para kapitalis. Dengan demikian, kaum buruh akan selalu miskin karena upah yang rendah, jauh di bawah nilai produktivitas marginalnya (Persky 1977).

Satu-satunya resep yang disodorkan oleh pengamat aliran ekonomi radikal untuk mengentaskan kemiskinan adalah mengubah sistem perekonomian secara radikal menjadi sistem perekonomian sosialis. Pada sistem ini, segala alat produksi haruslah dimiliki bersama oleh seluruh rakyat. Kegiatan perekonomian harus direncanakan dan dikendalikan secara terpusat.

Sistem perekonomian sosialis, paling tidak memiliki tiga kelemahan yang mendasar: (1) menekan kreativitas individu yang merupakan kunci bagi kemajuan ilmu, teknologi dan ekonomi; (2) membutuhkan biaya perencanaan dan pengendalian yang sangat besar; dan (3) terlalu sarat dengan beban birokrasi yang menghambat pembangunan.

Pengalaman sejarah memang menunjukkan bahwa sistem perekonomian sosialis tidak dapat berkelanjutan. Sejak semula Indonesia juga menolak sistem ini. Dengan demikian, teori ekonomi radikal tidak dapat dipakai untuk menjelaskan kemiskinan di Indonesia.

Teori Ekonomi Neoklasik

Teori ekonomi neoklasik diterapkan untuk menjelaskan kemiskinan yang ada pada sistem perekonomian pasar. Penganut aliran ini membedakan tiga jenis kemiskinan :

- 1) kemiskinan lahiriah,
- 2) kemiskinan kultural, dan
- 3) kemiskinan struktural.

Kemiskinan lahiriah timbul karena adanya cacat lahiriah (cacat tubuh atau mental) sehingga seseorang tidak sanggup memperoleh kehidupan yang layak. Bagi golongan ini, kemiskinan merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, mereka harus memperoleh bantuan dari pihak lain, baik pemerintah, kerabat, maupun dermawan.

Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang terjadi karena sikap dan perilaku sendiri. Bagi kaum neoklasik, kemiskinan kultural merupakan pilihan bebas individu dan itu merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kemiskinan kultural bukanlah suatu persoalan yang harus diatasi.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi karena tidak bekerjanya kekuatan pasar secara sempurna. Tegasnya, kemiskinan terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam struktur pasar (*market imperfections*). Bagi kaum neoklasik, kemiskinan yang terjadi di sektor pertanian dan di pedesaan adalah akibat adanya ketidakseimbangan pada pasar faktor produksi, khususnya pasar tenaga kerja (Schuh 1977).

Kaum neoklasik beranggapan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus difokuskan pada kemiskinan lahiriah dan kemiskinan struktural saja. Kemiskinan kultural bukanlah masalah yang perlu ditanggulangi secara khusus. Kemiskinan lahiriah harus ditanggulangi melalui suatu program bantuan peningkatan kesejahteraan (*welfare program*). Sedangkan kemiskinan struktural haruslah ditanggulangi dengan upaya-upaya yang mendorong berfungsinya pasar secara sempurna.

Teori Marginalisasi Sosial

Marginalisasi sosial adalah proses interaksi antara disinsentif dan adaptasi rasional dalam suatu lingkungan ekonomi. Adaptasi terhadap disinsentif cenderung tidak balik arah (*irreversible*) dalam menjerumuskan seseorang ke dalam segregasi kaum ekonomi pinggiran, ketergantungan dan modus aktivitas yang tuna produktif (*counter productive*) terhadap masyarakat secara keseluruhan (Padfield dan Young 1977).

Marginalisasi sosial yang terjadi karena institusi modern, khususnya sistem pendidikan, pasar bebas dan pengadilan, berfungsi sebagai proses penyaring yang menyisihkan dan mengelompokkan masyarakat yang kurang "mampu" dari kelompok umum (*main stream*). Kelompok masyarakat tersisih ini semakin terkucilkan karena tanggapan mereka terhadap tekanan untuk mempertahankan hidup cenderung "menyimpang" dan tuna produktif terhadap masyarakat umum. Pada akhirnya mereka membentuk suatu kelompok kumuh (*ghetto*) yang eksklusif.

Konsep marginalisasi sosial dapat dipakai untuk menerangkan proses pembentukan pemukiman kumuh di pedesaan dan perkotaan. Proses ini berjalan melalui empat fase:

1. Fase zaman keemasan atau fase rintisan. Pada fase ini, basis ekonomi cukup untuk menopang sistem kehidupan yang ada (boom ekonomi), sehingga praktis tidak ada masalah kemiskinan.
2. Fase pembenahan atau penipisan. Fase ini ditandai oleh adanya ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dengan permintaan pasar tenaga kerja lokal. Akibatnya, investasi sumber daya manusia dan perekonomian setempat menurun.
3. Fase pembentukan atau pembocoran. Pada fase ini, arus urbanisasi dan ruralisasi berjalan cepat. Sebagian orang desa yang masuk kota menghadapi tekanan ekonomi dan budaya yang berat. Dalam pada itu, penduduk perkotaan pun bermigrasi ke desa sehingga penduduk desa makin terdesak. Berbarengan dengan itu, nilai-nilai tradisional akan pudar. Kelompok yang tidak memperoleh lapangan kerja yang layak, mulai melakukan pekerjaan yang tuna produktif untuk kelangsungan hidup dan mereka akan disisihkan oleh masyarakat umum.
4. Fase *Ghetto* atau subsistem tertutup. Pada fase ini kaum miskin telah tersisih dan membentuk suatu kelompok kumuh yang eksklusif.

Tidak dapat disangkal bahwa konsep marginalisasi sosial cukup ampuh untuk menjelaskan keadaan empiris. Barangkali, keadaan Indonesia saat ini telah berada pada transisi menuju fase ketiga (pembentukan atau pembocoran). Hal ini ditandai oleh pesatnya arus modernisasi dan mulainya masuk faktor koneksi dalam pasar tenaga kerja. Suatu hal yang sangat penting dicatat ialah, konsep marginalisasi sosial menolak efektivitas pendekatan ekonomi neoklasik untuk pengentasan kemiskinan. Bahkan, sistem ekonomi neoklasik cenderung mempercepat proses marginalisasi sosial.

Teori Fungsional

Teori fungsional mengatakan bahwa kemiskinan muncul karena kaum miskin memiliki relung (*niche*) fungsional dalam tatanan perekonomian. Kaum miskin diperlukan sebagai alat ekonomi dan alat politik oleh kelompok menengah ke atas (Bould-van Til 1977). Sebagai alat ekonomi, kaum miskin berfungsi untuk mengerjakan pekerjaan kasar dan kotor. Di samping itu, kaum miskin diperlukan sebagai tenaga kerja murahan untuk menjamin daya saing ekonomi negara dan laba bagi pengusaha (Steidlmeier 1993).

Kaum miskin juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Dalam konteks ini, kaum miskin dapat menjadi bahan rebutan para politisi. Kaum miskin dapat dijadikan kaum oposisi sebagai argumen kegagalan penguasa. Para politisi seperti ini senantiasa akan berupaya agar kemiskinan tetap ada.

Para penganut teori fungsional berpendapat bahwa kemiskinan sangatlah sulit diberantas karena adanya relung fungsional tersebut di atas. Satu-satunya cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuat orang miskin menjadi beban bagi para golongan menengah ke atas. Dalam kaitan ini, sistem upah haruslah diubah, misalnya dengan sistem upah minimum yang efektif atau dengan sistem bagi laba. Strategi perolehan daya saing harus pula diubah dari keunggulan biaya tenaga kerja murah menjadi keunggulan teknologi dan manajemen.

Walaupun barangkali tidak mutlak, argumen teori fungsional juga memiliki kecocokan dengan situasi Indonesia, khususnya "fungsi ekonomi". Tidak dapat disangkal, para pengusaha Indonesia hingga kini masih menggunakan upah buruh yang murah sebagai instrumen untuk memperoleh laba dan daya saing. Hal ini memang dimungkinkan secara hukum pada sistem perekonomian pasar (ekonomi neoklasik). Sekali lagi, teori fungsional juga meragukan efektivitas pendekatan teori ekonomi neoklasik dalam upaya pengentasan kemiskinan.

MAKNA DAN IMPLIKASI PENDEKATAN AGRIBISNIS

Pengertian

Istilah agribisnis relatif masih baru. Pertama kali dilontarkan oleh Gredberg dan Davis (1957). Istilah agribisnis mengacu pada dua pengertian (Simatupang 1993) yaitu : sebagai jenis usaha ekonomi dan sebagai sistem.

Sebagai jenis usaha ekonomi, agribisnis adalah segala usaha ekonomi yang berkaitan dengan usahatani, yang meliputi usaha pengadaan sarana produksi, usahatani, usaha pengolahan hasil-hasil pertanian dan usaha perdagangan sarana produksi usahatani, produk usahatani dan produk olahan hasil-hasil pertanian. Sebagaimana sebuah usaha ekonomi, agribisnis memiliki ciri-ciri pokok, yaitu: (1) berorientasi pasar, (2) rasional ekonomis, dan (3) impersonal kompetitif.

Berorientasi pasar mengandung arti bahwa agribisnis mempergunakan pasar sebagai media untuk memperoleh sarana produksi dan mendistribusikan produk yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa agribisnis bersifat komersial yang ditandai oleh: (a) sebagian besar sarana produksi dibeli dari pasar; dan (b) hasil produksi yang diperoleh terutama dijual di pasar.

Rasional ekonomis mengandung arti bahwa agribisnis senantiasa berupaya untuk memperoleh manfaat ekonomi (biasanya keuntungan) yang sebesar-besarnya. Sifat yang rasional ekonomis mempunyai implikasi: (a) alokasi sumber daya didasarkan pada azas marginal dan keunggulan komparatif, (b) pembagian hasil produksi (distribusi pendapatan) didasarkan pada nilai kontribusi masing-masing faktor produksi.

Agribisnis yang bersifat impersonal kompetitif mengandung arti bahwa segala keputusan didasarkan pada pertimbangan ekonomi, bukan sosial atau moral, dan setiap para pelaku bersaing untuk mengejar manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya. Tegasnya, para pelaku ekonomi bersifat bebas, tamak dan individualistik.

Sistem agribisnis terdiri dari jaringan usaha agribisnis dan prasarana yang turut mempengaruhi agribisnis tersebut, seperti jalan raya, pasar, penyuluh, pendidikan dan instansi pemerintah. Sebagai satuan sistem, setiap usaha agribisnis tidak dapat berkembang secara independen. Keragaan setiap usaha agribisnis dipengaruhi oleh usaha agribisnis dan prasarana terkait.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pendekatan agribisnis adalah kebijaksanaan dalam pembangunan pertanian dengan ciri-ciri pokok:

1. Memperlakukan usahatani sebagai salah satu usaha ekonomi yang mengejar keuntungan dan bebas mengambil keputusan.
2. Menyadari bahwa usahatani hanya sebagai satu komponen dari/dan tergantung pada sistem agribisnis.
3. Berlandaskan pada sistem perekonomian pasar.
4. Upaya-upaya pokok yang dilakukan adalah: menghilangkan distorsi pasar, membangun prasarana penunjang agribisnis, merangsang perkembangan agribisnis yang terpadu, selaras dan berimbang.

Dengan ciri-ciri di atas, pendekatan agribisnis tidak lain adalah kebijaksanaan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan dan efisiensi ekonomi yang didasarkan pada teori neoklasik. Kebijakan ini sama sekali tidak punya fokus pada kemiskinan dan pemerataan. Dengan sendirinya, segala keunggulan dan kekurangan yang melihat sistem perekonomian pasar bebas (neoklasik) akan melekat pula pada kebijaksanaan pendekatan agribisnis.

Implikasi terhadap Manajemen Usahatani

Seperti yang telah disebutkan, kebijaksanaan pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis pada hakekatnya berlandaskan pada teori ekonomi neoklasik. Prinsip utama dari kebijaksanaan ini adalah mengupayakan agar mekanisme pasar

berjalan dengan efisien. Dengan sendirinya, instrumen utama dari kebijaksanaan ini adalah deregulasi/debirokratisasi, pembangunan prasarana ekonomi dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi investasi swasta pada bidang agribisnis.

Dengan kebijaksanaan yang demikian, agribisnis (sebagai usaha ekonomi) diharapkan akan berkembang pesat, baik melalui pendalaman dan perluasan usaha yang telah ada maupun melalui masuknya perusahaan baru (*new entry*). Kini jelaslah bahwa kebijaksanaan pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis tidak lain adalah strategi untuk mendorong pertumbuhan.

Selain mendorong perkembangan usaha, pendekatan agribisnis akan dapat pula mendorong peningkatan laba perusahaan, baik melalui peningkatan efisiensi usaha maupun melalui perluasan usaha. Dengan demikian, pendekatan agribisnis sangat cocok untuk tujuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan laba perusahaan agribisnis. Namun demikian, pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis akan menimbulkan tekanan (*stress*) berat terhadap manajer usahatani. Dalam hal ini, beberapa perubahan yang akan dihadapi para petani adalah:

1. Norma keputusan didominasi oleh rasional ekonomi formal dan lembaga-lembaga sosial tradisional akan memudar.
2. Ongkos produksi semakin besar seiring dengan penghapusan subsidi melalui deregulasi. Harga faktor produksi seperti pupuk dan pestisida akan meningkat, sedangkan biaya penggunaan sarana publik seperti irigasi harus turut pula ditanggung petani.
3. Risiko usahatani, khususnya risiko harga, semakin besar seiring dengan semakin terbukanya usahatani terhadap pasar yang berbarengan dengan semakin berkurangnya campur tangan pemerintah.
4. Persaingan antara sesama petani semakin berat karena adanya kebebasan berusaha.
5. Usahatani semakin rentan terhadap conjungtur perekonomian nasional maupun global seiring dengan meningkatnya keterkaitan sistem agribisnis.

Tidak dapat disangkal bahwa perubahan-perubahan di atas akan menimbulkan *stress* berat terhadap petani yang memiliki kemampuan wiraswasta rendah, modal kecil dan *marketable surplus* kecil. Para petani gurem akan kalah bersaing. Dengan demikian, pendekatan agribisnis kurang memberi nilai tambah bagi petani kecil.

Untuk wilayah-wilayah di mana volume *marketable surplus* petani pada umumnya besar, usahatani tidak berkembang karena adanya kendala pemasaran hasil dan perolehan sarana produksi. Dengan demikian, pendekatan agribisnis akan sangat efektif. Hal ini kiranya dapat dipahami, karena dengan pendekatan agribisnis, pemasaran hasil usahatani dan sarana produksi akan lancar dan efisien. Oleh karena itu, pendekatan agribisnis hanya efektif untuk pengentasan kemiskinan petani yang memiliki potensi *marketable surplus* besar, namun menghadapi masalah dalam pemasaran.

PENDEKATAN AGRIBISNIS DAN PETANI TANAMAN PANGAN MISKIN

Usahatani tanaman pangan, khususnya yang berskala kecil, barangkali paling peka terhadap kebijaksanaan pendekatan agribisnis dibandingkan dengan cabang-cabang usahatani lainnya karena alasan berikut:

1. Usahatani tanaman pangan merupakan yang paling banyak menerima proteksi dari pemerintah. Berkurangnya proteksi pemerintah akan berdampak lebih besar terhadap petani.
2. Permintaan terhadap produk usahatani tanaman pangan tidak elastis, sehingga harganya cenderung menurun dan tidak stabil.
3. Skala usahatani tanaman pangan umumnya kecil dan produksinya juga dipakai untuk konsumsi keluarga petani sendiri, sehingga *marketable surplus*-nya umumnya kecil.

Ciri-ciri di atas, kebijaksanaan pendekatan agribisnis akan membuat usahatani tanaman pangan cenderung memperoleh manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan cabang usahatani lainnya. Dalam kondisi demikian, petani cenderung mengalihkan usahatani ke nontanaman pangan. Dalam konteks ini, pendekatan agribisnis dapat berperan untuk mendorong diversifikasi pertanian.

Petani tanaman pangan miskin merupakan yang paling tertekan dengan kebijaksanaan pendekatan agribisnis tersebut. Kelompok petani ini dicirikan oleh *marketable surplus* yang rendah. Bahkan dapat dikatakan bahwa usahatani tanaman pangan keluarga miskin pada umumnya bersifat subsisten. Usahatani yang demikian barangkali tidak akan memperoleh tambahan manfaat dari kebijaksanaan pendekatan agribisnis. Sebaliknya, kebijaksanaan ini cenderung *immiserizing*.

KESIMPULAN

Kebijaksanaan pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis berlandaskan pada kerangka teori neoklasik (ekonomi pasar bebas). Segala kebaikan dan keburukan yang terdapat pada sistem neoklasik juga akan melekat pada pendekatan agribisnis tersebut. Pendekatan agribisnis sangat cocok untuk mendorong pertumbuhan dan efisiensi usaha, dan sama sekali tidak difokuskan untuk pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, pendekatan agribisnis sangat potensial untuk menimbulkan dampak *immiserizing* bagi petani, khususnya bagi petani tanaman pangan miskin.

Pendekatan agribisnis sangat tepat digunakan di wilayah-wilayah pertanian dengan potensi *marketable surplus* yang besar, namun tidak berkembang karena tidak adanya pasar yang efisien. Pada wilayah seperti ini, pendekatan agribisnis akan dapat mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

Pendekatan agribisnis akan menimbulkan *stress* terhadap usahatani tanaman pangan, khususnya yang berskala kecil. Usahatani akan semakin tergantung pada kondisi ekonomi nasional maupun global, sehingga semakin rentan terhadap konjungtur ekonomi. Hal ini akan mendorong diversifikasi pertanian dan memperkecil peranan tanaman pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth, A. 1992.** Counting the poor in Indonesia. Working Paper No. 17. Department Economic School of Oriental and African Studies, University of London.
- Bould-Van Til, S. 1977.** Social cost of poverty. *In: R.O. Coppedge and C.G. Davis (eds.), Rural Poverty and the Policy Crisis.* Iowa State University Press.
- Gredberg, R. and D.J. Davis. 1957.** A concept of agribusiness. Harvard University, Boston.
- Padfield, H.T. and J.A. Young. 1977.** Institutional processing of human resources: a theory of social marginalization. *In: R.O. Coppedge and C.G. Davis (Eds.), Rural Poverty and the Policy Crisis.* Iowa State University Press.
- Persky, J. 1977.** Radical political economics, poverty and income distribution. *In: R.O. Coppedge and C.G. Davis (Eds.), Rural Poverty and the Policy Crisis.* Iowa State University Press.
- Schuh, E.G. 1977.** Neoclassical economic theory, poverty and income distribution. *In: R.O. Coppedge and C.G. Davis (Eds.), Rural Poverty and the Policy Crisis.* Iowa State University Press.
- Simatupang, P. 1993.** Penelitian pertanian dengan pendekatan agribisnis. Makalah disampaikan pada Pelatihan Peningkatan Manajemen Sumber Daya Penelitian. Badan Litbang Pertanian. Yogyakarta, Januari 1993.
- Steidlmeier, P. 1993.** The business community and the poor: rethinking business strategies and social policy. *American Journal of Economics and Sociology.* 52(2).
- World Bank. 1990.** Indonesia: poverty assesment and strategy report. Asia Regional Office.